

Penulis 1 : Irianna Sintya Megianny

Penulis 2 : Dr. Hj. Nunuy Afiah

Judul : Analisis Cost & Benefit Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Serta Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung)

ABSTRAK

Analisis Cost & Benefit Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Serta Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung)

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) beralih dari pajak pusat menjadi pajak daerah. Tujuan dari pengalihan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, menurut simulasi yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) hanya 25% daerah yang akan mengalami peningkatan pendapatan dari pengalihan pajak ini. Selain karena dipengaruhi kondisi wilayah dan perekonomian, kesiapan pemerintah pun merupakan kunci keberhasilan pengalihan.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten Bandung dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk proses persiapan dan pengelolaan dibandingkan dengan manfaat yang diterima daerah.

Hasilnya adalah Kabupaten Bandung telah menganut asas pemungutan pajak yaitu, *Economic of Collection* dimana biaya yang dikeluarkan lebih kecil daripada uang pajak yang diterima dan juga termasuk dalam daerah yang sukses melakukan pengalihan pajak.

Kata Kunci : Pengalihan BPHTB dan PBB-P2, Dinas Pendapatan dan Pengeolaan Keuangan Kab. Bandung, Simulasi ADB, *Economic of Collection*, Biaya dan Manfaat

Penulis 1 : Irianna Sintya Megianny

Penulis 2 : Dr. Hj. Nunuy Afiah

Judul : Analisis Cost & Benefit Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Serta Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung)

ABSTRACT

Analysis Cost & Benefit Customs Acquisition Rights Transfer of Land and Land and Building Tax From Tax Center Being Local Taxes (Cas Study at the Department of Revenue and Financial Management Kabupaten Bandung)

Law No. 28 of 2009 states that the Customs Acquisition Rights to Land and Building and Land and Building tax switching from central taxes into local taxes. The purpose of this transfer is to increase revenue. However, according to the simulations carried out by the *Asian Development Bank* (ADB) is only 25% of the area that will experience an increase in revenue from the transfer tax due. Whether affected regions and economic conditions, the readiness of the government is the key to the success of this transfer..

This research was conducted at the Department of Revenue and Financial Management Kabupaten Bandung by using qualitative descriptive approach. The purpose of this study was to see how much it costs for the preparation and management process compared with the benefits received area.

The result is the Kabupaten Bandung has adopted a principle of taxation, namely, *Economic of Collection*, which costs less than the tax money received and also included in the area which successfully transfer tax.

Keywords: Transfer of BPHTB and PBB-P2, the Department of Revenue and Financial Management Kab. Bandung, Simulation ADB, Economic of Collection, Costs and Benefits.